

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku pekebun merupakan respons yang ditunjukkan oleh para pelaku usaha perkebunan, khususnya pekebun kelapa sawit, terhadap berbagai rangsangan dari lingkungan luar seperti kebijakan pemerintah, harga pasar, kondisi lahan, dan perubahan iklim. Respons ini dapat berupa keputusan dalam memilih metode budidaya, penggunaan pupuk, pengelolaan lahan, hingga pola distribusi hasil panen. Dengan kata lain, perilaku pekebun mencerminkan bagaimana mereka menyikapi situasi eksternal yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha perkebunan, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Sebagaimana dipaparkan oleh Notoatmodjo (2014), dimensi biologis memandang perilaku sebagai rangkaian aktivitas organisme yang dapat dideteksi melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung. Secara esensial, perilaku manusia merupakan cerminan dari dinamika kegiatannya sehari-hari. Sementara itu, dalam ranah operasional, perilaku dikonseptualisasikan sebagai respons nyata seseorang ketika berinteraksi dengan berbagai rangsangan yang berasal dari lingkungan luar.

Perilaku pekebun kelapa sawit memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan usaha perkebunan rakyat (Aisyah *et al.*, 2021). Cara pekebun mengelola kebunnya sering kali sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, pengalaman, dan seberapa besar dukungan yang mereka terima dari berbagai pihak, seperti pemerintah atau perusahaan. Ketika pekebun memiliki pemahaman yang baik terhadap *standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*, mereka cenderung lebih sadar dan berusaha menerapkan praktik ramah lingkungan, misalnya membuka lahan tanpa membakar dan menggunakan bibit yang bersertifikat (Nashr *et al.*, 2021). Namun, bagi pekebun yang kurang memiliki akses terhadap informasi dan pendampingan, praktik yang dilakukan sering kali masih bersifat konvensional dan dapat berdampak buruk terhadap lingkungan, seperti penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan (Suardi *et al.*, 2022). Oleh karena itu, perubahan perilaku pekebun menjadi kunci penting dalam upaya memperkuat pelaksanaan kebijakan keberlanjutan di sektor perkebunan kelapa sawit (Siahaan *et al.*, 2023).

Perilaku pekebun di Indonesia mengenai tata kelola perkebunan kelapa sawit menunjukkan pola adaptasi yang dinamis. Masyarakat cenderung mengikuti tren ekspansi lahan, baik secara legal maupun ilegal, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Namun, fenomena ini juga menghadirkan tantangan seperti ketimpangan penguasaan lahan, konflik sosial, serta dampak lingkungan yang signifikan. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatur tata kelola perkebunan kelapa sawit melalui kebijakan seperti sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) guna mendorong praktik yang lebih berkelanjutan (Basir, 2025).

Dalam konteks yang lebih spesifik, dinamika perilaku pekebun di Sumatera Barat dalam mengelola perkebunan kelapa sawit tidak terlepas dari pengaruh multidimensi, mulai dari aspek ekonomi, tatanan sosial, hingga kondisi lingkungan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat lokal kerap terbentur pada kompleksitas manajerial, terutama terkait eskalasi sengketa agraria antara petani dan pihak korporasi. Fenomena ini sering kali berakar pada implementasi skema kemitraan yang dipandang tidak proporsional dan berat sebelah, sehingga menciptakan ketegangan struktural yang berdampak pada keberlangsungan tata kelola perkebunan itu sendiri (SPKS, 2020). Meskipun banyak petani memilih menanam kelapa sawit karena potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pertanian tradisional, mereka sering merasa dirugikan karena ketergantungan pada perusahaan besar dalam hal harga dan pemasaran hasil perkebunan. Hal ini menciptakan ketimpangan antara perusahaan dan petani kecil, yang sering kali tidak dapat mengendalikan harga dan kualitas produksi mereka (Elaeis.co, 2023).

Keberadaan industri kelapa sawit di wilayah Kabupaten Dharmasraya memegang peranan krusial sebagai pilar penyangga ekonomi lokal. Sektor ini tidak hanya menjadi instrumen utama dalam menghasilkan pendapatan daerah, tetapi juga berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja massal yang menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar masyarakat di daerah tersebut. Petani di daerah ini mengelola perkebunan dengan cara tradisional dan modern. Banyak yang masih menggunakan metode lama seperti pembakaran lahan, yang dapat merusak lingkungan. Sebagian petani bekerja sama dengan perusahaan besar melalui sistem kemitraan plasma-inti, di mana mereka mendapat bantuan sarana produksi, pelatihan, dan akses pasar.

Namun, masih ada kendala dalam menerapkan praktik perkebunan yang ramah lingkungan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Menyikapi kondisi tersebut, penguatan sinergi kolektif yang melibatkan otoritas pemerintah, sektor swasta, serta elemen masyarakat menjadi prasyarat mutlak dalam mengupayakan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang lebih komprehensif. Langkah kolaboratif ini krusial untuk memastikan bahwa praktik agribisnis di Kabupaten Dharmasraya tidak hanya berorientasi pada profit semata, namun juga selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek kelestarian lingkungan dan keadilan sosial.

Selain menjadi penggerak ekonomi masyarakat, ekspansi perkebunan kelapa sawit juga memunculkan berbagai persoalan ekologis yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dampak yang paling signifikan dari ekspansi ini adalah fenomena deforestasi, di mana konversi hutan primer menjadi area monokultur kelapa sawit memicu degradasi biodiversitas secara masif. Transformasi lahan tersebut tidak hanya mengancam kelangsungan flora dan fauna endemik, tetapi juga merusak stabilitas fungsi ekologis, terutama dalam hal kemampuan alamiah hutan sebagai penyerap karbon (carbon sink) serta regulator siklus hidrologi yang vital bagi keseimbangan lingkungan setempat. Di sisi lain, penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara intensif dalam sistem monokultur sawit turut menyebabkan penurunan kualitas tanah dan pencemaran sumber daya air di sekitarnya (Obidzinski *et al.*, 2012).

Dampak tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek ekologi. Penerapan prinsip keberlanjutan berbasis ekosistem, seperti agroforestri, pengelolaan terpadu hama secara biologis, serta konservasi tanah dan air menjadi pendekatan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Selain itu, peran aktif masyarakat lokal dalam mengadopsi praktik ramah lingkungan juga menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang tidak merusak daya dukung ekologis wilayah.

Sistem tata kelola industri sawit di Indonesia diatur secara hierarkis melalui instrumen hukum dari tingkat pusat hingga ke ranah regional. Di level nasional, UU No. 39 Tahun 2014 menjadi acuan utama yang diperkuat oleh berbagai regulasi

turunan berupa Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Kebijakan tersebut mencakup standardisasi perizinan, prosedur pemanfaatan lahan, kewajiban mitigasi dampak lingkungan, serta kewajiban sertifikasi keberlanjutan melalui mekanisme ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*). Selain kerangka regulasi tersebut, Pemerintah mendirikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai instrumen pendanaan strategis dalam memperkuat sektor ini. Lembaga ini memiliki peran sentral dalam mengelola sumber daya finansial guna mengakselerasi program pengembangan sawit, mulai dari peremajaan tanaman hingga peningkatan produktivitas di tingkat produsen. Pada lingkup regional, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengimplementasikan kebijakan khusus yang mengatur standardisasi harga Tandan Buah Segar (TBS) serta distribusi wewenang antar instansi daerah dalam tata kelola perkebunan. Namun, di tingkat Kabupaten Dharmasraya, informasi mengenai regulasi spesifik masih terbatas, meskipun daerah ini mengalami pertumbuhan signifikan dalam sektor kelapa sawit.

Implementasi standar ISPO memberikan nilai tambah strategis bagi perusahaan dalam memperkuat posisi tawar di pasar global. Hal ini disebabkan oleh kebijakan restriktif dari sejumlah negara importir dan entitas korporasi multinasional yang menetapkan sertifikasi keberlanjutan sebagai kriteria mutlak dalam prosedur pengadaan bahan baku. Dengan terpenuhinya kualifikasi tersebut, perusahaan dapat meminimalisir hambatan dagang sekaligus memperluas jangkauan penetrasi pasar di tingkat internasional. Bagi petani, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan melalui teknik budidaya ramah lingkungan yang meningkatkan hasil produksi dan mengurangi kerusakan akibat kebakaran lahan, serta memperbaiki kesejahteraan sosial pekerja dan masyarakat sekitar. Namun, tantangan muncul karena petani kecil seringkali kesulitan memenuhi standar ISPO, dengan biaya sertifikasi yang tinggi dan beban administratif yang berat, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan peluang pasar yang ada. Implementasi kebijakan ini juga menghadapi hambatan di daerah dengan pengawasan yang lemah, yang mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kapasitas pengawasan dan memberikan dukungan lebih besar kepada petani kecil untuk memastikan kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Tantangan utama dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia, termasuk

di Sumatera Barat dan Dharmasraya, meliputi penerapan praktik keberlanjutan, pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kapasitas petani dalam menghadapi perubahan regulasi dan tuntutan pasar global. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sektor ini.

Sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia Tenggara, struktur ekonomi Indonesia ditopang oleh diversifikasi sektor yang meliputi pertanian, manufaktur, perdagangan, serta jasa (BPS Indonesia, 2024). Di dalam sektor pertanian, subsektor perkebunan khususnya komoditas kelapa sawit memegang peranan vital sebagai kontributor signifikan terhadap Produk Domestik Bruto nasional (Ditjenbun PPID, 2020). Kapasitas Indonesia sebagai produsen minyak sawit mentah terbesar di tingkat global memungkinkan komoditas ini menjadi pilar utama dalam perolehan devisa negara serta penyediaan lapangan kerja secara masif. Meskipun memiliki nilai strategis dalam peningkatan pendapatan domestik, industri ini tetap dihadapkan pada tantangan struktural yang kompleks termasuk tuntutan pelestarian lingkungan, standarisasi keberlanjutan, serta fluktuasi kebijakan perdagangan internasional.

Sumatera Barat memiliki perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Provinsi ini dikenal dengan hasil-hasil perkebunan seperti karet, kakao, dan kelapa sawit. Sektor pertanian berkontribusi besar terhadap PDRB provinsi, dengan kelapa sawit menjadi salah satu komoditas andalan. Meskipun sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian daerah, tantangan yang dihadapi antara lain adalah fluktuasi harga komoditas, keterbatasan akses teknologi modern, serta aspek keberlanjutan lingkungan dalam pengelolaan perkebunan.

Wilayah Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatra Barat memiliki prospek yang sangat luas dalam bidang perkebunan dengan komoditas kelapa sawit sebagai sektor unggulan. Ekspansi perkebunan di daerah tersebut telah menunjukkan progres yang signifikan sehingga saat ini memegang peranan sebagai tulang punggung ekonomi bagi penduduk lokal. Meskipun memberikan kontribusi positif terhadap kemakmuran daerah, dinamika industri ini juga memunculkan sejumlah hambatan operasional seperti keterbatasan akses infrastruktur,

ketidakpastian harga komoditas di pasar, serta permasalahan ekologis yang menuntut pola pengelolaan yang lebih bertanggung jawab. Guna merespons kondisi tersebut, pemerintah setempat secara konsisten melakukan intervensi melalui kebijakan penguatan produktivitas dan standarisasi mutu hasil panen. Langkah ini diimplementasikan melalui skema pendampingan intensif serta program penyuluhan yang ditujukan kepada para pekebun dalam mengoptimalkan tata kelola lahan mereka.

Secara umum, kebun sawit masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kebun plasma dan kebun swadaya. Kebun plasma merupakan bagian dari skema kemitraan dengan perusahaan, dimana petani mendapat dukungan bibit, pupuk, pelatihan, dan akses pasar. Sebaliknya, kebun swadaya dikelola secara mandiri oleh petani tanpa intervensi langsung dari perusahaan. Kedua jenis kebun ini sama-sama berperan penting dalam mendukung keberlangsungan industri kelapa sawit, terutama dalam mendorong kesejahteraan petani dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia, termasuk di Sumatra Barat dan Kabupaten Dharmasraya.

Secara nasional, kelapa sawit merupakan penyumbang devisa terbesar dan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia. Di tingkat provinsi, industri ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah, menyediakan lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan. Pada wilayah Kabupaten Dharmasraya, sektor perkebunan kelapa sawit telah memantapkan posisinya sebagai pilar utama perekonomian masyarakat setempat. Kondisi ini memicu antusiasme para pekebun untuk melakukan ekspansi area budidaya secara mandiri guna meningkatkan kapasitas produksi mereka. Dinamika mengenai penambahan luas konsesi lahan serta tren volume produksi tahunan secara mendetail dapat dicermati melalui data yang disajikan dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Luas lahan dan produksi tanaman kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya.

No	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas (Ha)	32.569	32.744	32.947	33.838	34.738
2	Produksi (Ton)	104.993	92.103	103.637	120.591	127.906

BPS Dharmasraya, (2025)

Ekspor CPO dari Sumatra Barat didominasi oleh negara tujuan seperti India, Bangladesh, dan Pakistan. Pada November 2023, volume ekspor minyak kelapa sawit dari Sumatra Barat mencapai sekitar 1,029 juta ton dengan nilai Rp4,87 triliun (ANTARA Sumatera Barat, 2023). Mengingat besarnya potensi yang dimiliki, implementasi strategi komprehensif menjadi krusial untuk menjamin bahwa industri kelapa sawit mampu bertumbuh secara seimbang pada dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi. Atas dasar tersebut, identifikasi serta pemahaman mendalam mengenai pola perilaku masyarakat di Kabupaten Dharmasraya dalam praktik tata kelola perkebunan menjadi hal yang sangat mendasak untuk dilakukan. Melalui pendekatan ini, temuan penelitian diproyeksikan dapat menghasilkan dasar pertimbangan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif guna mewujudkan manajemen perkebunan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, upaya tersebut diharapkan mampu mengakselerasi taraf kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor komoditas ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi pekebun tentang budidaya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan?
2. Bagaimana pengetahuan dan persepsi pekebun terhadap ekologi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya?
3. Bagaimana perilaku pekebun dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis persepsi pekebun tentang budidaya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan
2. Menganalisis pengetahuan dan persepsi pekebun terhadap ekologi perkebunan kelapa sawit di kabupaten Dharmasraya.
3. Menganalisis perilaku pekebun dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya, dan memahami pola interaksi, tantangan, serta praktik yang diterapkan dalam pengelolaan perkebunan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan kajian ilmiah di bidang sosial ekonomi pertanian, khususnya mengenai perilaku pekebun dalam menerapkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Temuan mengenai pengetahuan pekebun terhadap standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) serta variasi perilaku dalam pengelolaan kebun menjadi dasar penting bagi penguatan konsep tentang hubungan antara pengetahuan dan perilaku dalam penerapan prinsip keberlanjutan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan model pemberdayaan pekebun berbasis pengetahuan dan kesadaran lingkungan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Petani/ Pekebun

Penelitian ini diproyeksikan mampu mengoptimalkan tingkat kesadaran serta pemahaman para pekebun mengenai urgensi implementasi praktik agribisnis yang berkelanjutan dan standarisasi ISPO. Berdasarkan temuan ini, para pelaku usaha perkebunan diharapkan dapat mentransformasi pola manajemen lahan ke arah yang lebih ekologis dan efisien. Fokus utama dari perubahan tersebut adalah pada orientasi keberlanjutan operasional jangka panjang yang tetap menjaga stabilitas angka produktivitas hasil panen.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan program pendampingan yang lebih efektif, terutama dalam upaya peningkatan kapasitas pekebun melalui penyuluhan, pelatihan, dan sosialisasi ISPO. Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam perencanaan kebijakan pengelolaan sumber daya perkebunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

c. Bagi Masyarakat dan Lingkungan

Dengan tata kelola lahan yang lebih efektif, masyarakat bisa memperoleh keuntungan ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan, misalnya lewat penerapan praktik ramah lingkungan pada perkebunan rakyat.